

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Taylor & Procter dalam Soelistyarini (2013) tinjauan pustaka atau kajian pustaka (*Literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk mengkaji ataupun meninjau kembali berbagi literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka juga merupakan bagian yang menjelaskan lebih dalam terkait variabel-variabel dan landasan teori yang digunakan atau bisa disebut dengan *Grand Theory*.

Di dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan tinjauan literatur yang didasarkan pada kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka ini akan dibahas dalam dua pembahasan, yang pertama yaitu membahas konsep dasar dari variabel yang diteliti, dan yang kedua akan membahas penelitian terdahulu.

2.1.1 Harga Beras

Harga beras merupakan salah satu variabel ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat beras adalah komoditas pangan utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk. Secara konseptual, harga beras dapat diartikan sebagai nilai tukar beras dalam satuan moneter tertentu yang terbentuk melalui mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran beras pada waktu dan wilayah tertentu.

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2018), harga suatu komoditas merupakan sinyal ekonomi yang mencerminkan kelangkaan relatif barang tersebut di pasar.

Dalam konteks beras, harga mencerminkan kondisi ketersediaan beras yang dihadapkan pada kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketika pasokan beras lebih besar dibandingkan permintaan, harga cenderung menurun, sedangkan apabila permintaan lebih besar daripada pasokan, harga beras akan mengalami peningkatan.

Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan harga beras sebagai harga rata-rata beras yang dibayar oleh konsumen per kilogram pada tingkat eceran, yang diperoleh melalui survei harga konsumen di berbagai wilayah. Harga ini mencerminkan kondisi pasar aktual dan sering digunakan sebagai indikator untuk melihat dinamika inflasi pangan, mengingat kontribusi beras yang cukup besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga.

Dalam kajian ekonomi pertanian, harga beras tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural lainnya. Saptana dan Suryana (2020) menyatakan bahwa harga beras dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi padi, pola konsumsi masyarakat, kondisi distribusi, serta karakteristik wilayah. Produksi padi yang bersifat musiman menyebabkan pasokan beras tidak merata sepanjang tahun, sehingga berpotensi menimbulkan fluktuasi harga.

Selain itu, permintaan beras di Indonesia bersifat relatif *inelastis*, karena beras merupakan kebutuhan pokok. Artinya, perubahan harga beras tidak secara signifikan mengurangi jumlah konsumsi, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Taufiq dan Nurmalina (2021) yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga beras, konsumsi

beras rumah tangga cenderung tetap, sehingga tekanan harga lebih banyak berdampak pada daya beli masyarakat dibandingkan pada volume konsumsi.

Harga beras juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi inflasi. Menurut Bank Indonesia (2022), beras termasuk dalam kelompok bahan pangan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap *inflation volatile food*. Kenaikan harga beras yang bersifat persisten dapat mendorong peningkatan inflasi, terutama pada wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.

Dari sisi spasial, harga beras menunjukkan perbedaan antarwilayah yang dipengaruhi oleh biaya transportasi, infrastruktur, dan efisiensi rantai pasok. Penelitian Aini et al. (2022) menemukan bahwa ketidakseimbangan distribusi dan tingginya biaya logistik menyebabkan disparitas harga beras antara wilayah sentra produksi dan wilayah konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan harga beras tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi, tetapi juga oleh efisiensi sistem pemasaran dan distribusi.

2.1.1.1 Teori Harga Beras

Teori harga merupakan bagian inti dari teori ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana harga suatu barang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. harga berfungsi sebagai sinyal ekonomi yang mengoordinasikan keputusan produsen dan konsumen. *Prices are the signals that guide the allocation of resources in a market economy* (Mankiw, 2021). Ketika harga meningkat, produsen terdorong meningkatkan produksi, sementara konsumen cenderung mengurangi konsumsi, dan sebaliknya.

a. Teori Permintaan dan Penawaran (*Supply and Demand Theory*)

Teori permintaan dan penawaran merupakan fondasi utama dalam analisis harga komoditas. Hukum permintaan menyatakan bahwa, dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan jumlah yang diminta, sedangkan penurunan harga akan meningkatkan jumlah yang diminta. Di sisi lain, hukum penawaran menyatakan bahwa kenaikan harga akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah yang ditawarkan (Mankiw, 2021).

Dalam konteks pasar beras, keseimbangan harga (harga ekuilibrium) terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Perubahan pada salah satu atau kedua kurva tersebut akan menggeser posisi keseimbangan dan menghasilkan tingkat harga serta kuantitas beras yang baru. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva penawaran beras antara lain adalah perubahan produksi padi, kebijakan pemerintah, dan biaya distribusi, sedangkan faktor yang menggeser kurva permintaan meliputi perubahan pendapatan, jumlah penduduk, dan preferensi konsumen.

b. Teori Harga dan Efisiensi Pasar

Dalam konteks efisiensi pasar, harga beras yang terbentuk secara kompetitif seharusnya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi mengenai produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Menurut Fama (1970), pasar yang efisien adalah pasar di mana harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Namun, pada kenyataannya, pasar beras di Indonesia masih menghadapi berbagai ketidaksempurnaan, seperti asimetri informasi, dominasi pedagang besar,

dan keterbatasan infrastruktur distribusi, sehingga harga yang terbentuk seringkali menyimpang dari harga yang seharusnya terjadi di pasar yang kompetitif (Aini et al., 2022).

Secara keseluruhan, teori harga beras menunjukkan bahwa pembentukan dan perubahan harga beras dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari produksi yang bersifat musiman, permintaan yang relatif inelastis, hingga kondisi distribusi dan karakteristik pasar wilayah. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menjadikan harga beras sebagai variabel ekonomi yang strategis dan sensitif.

2.1.2 Harga Eceran Tertinggi

Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditas beras adalah salah satu kebijakan harga yang dilaksanakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepastian, serta keterjangkauan harga beras agar tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi (Desi et al., 2019).

Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah adalah penetapan batas harga tertinggi beras melalui Permendag No. 57 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, yang mulai berlaku pada 1 September 2017 (Kemendag, 2017). Regulasi ini menetapkan HET untuk dua jenis beras, yaitu beras medium dan beras premium, dengan pembagian zona wilayah yang bertujuan mengakomodasi perbedaan biaya distribusi dan logistik antar daerah. Kebijakan ini secara eksplisit dimaksudkan untuk menciptakan kepastian harga di tingkat ritel,

menekan inflasi pangan, serta mencegah praktik penjualan beras dengan harga yang tidak wajar.

Seiring perkembangan kondisi pasar dan meningkatnya tekanan harga pasca pandemi COVID-19, kebijakan HET beras mengalami penyesuaian melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatur kembali besaran HET berdasarkan zonasi wilayah. Penyesuaian ini mencerminkan sifat HET yang dinamis dan responsif terhadap perubahan struktur biaya, kondisi pasokan, serta perkembangan harga di pasar. Provinsi Maluku, yang termasuk dalam zona dengan HET relatif lebih tinggi, mencerminkan tingginya biaya distribusi dan keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan (Badan Pangan Nasional, 2023).

Secara normatif, tujuan utama HET beras adalah menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen serta mengendalikan volatilitas harga dan inflasi nasional. Dalam kerangka kebijakan publik, HET berperan sebagai pelengkap kebijakan pangan lainnya seperti operasi pasar, penugasan BULOG, dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

2.1.2.1 Teori Harga Eceran Tertinggi

a. Teori Harga Maksimum (*Price Ceiling Theory*)

Secara teoritis, HET beras berlandaskan pada konsep *price ceiling* atau harga maksimum dalam teori ekonomi mikro. Mankiw (2018) mendefinisikan *price ceiling* sebagai batas atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, terutama pada barang kebutuhan pokok. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terjadi kegagalan pasar

(*market failure*), mekanisme harga bebas sering menghasilkan harga yang melampaui kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat.

Pindyck dan Rubinfeld (2018) membedakan dua jenis intervensi harga pemerintah, yaitu: (1) *price ceiling* yang bertujuan melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi dan (2) *price floor* yang bertujuan melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah. HET beras merupakan penerapan *price ceiling* yang secara langsung relevan dengan variabel dalam penelitian ini.

Teori ekonomi lebih lanjut menjelaskan bahwa penerapan harga maksimum yang berada di bawah harga keseimbangan pasar berpotensi menimbulkan distorsi, seperti kekurangan pasokan (*shortage*), penurunan insentif produksi, dan munculnya pasar informal (Samuelson & Nordhaus, 2010).

b. Teori Intervensi Pemerintah dalam Pasar Pangan

Teori intervensi pemerintah dalam pasar pangan menegaskan bahwa pasar komoditas pangan strategis memiliki karakteristik yang rentan terhadap kegagalan pasar (*market failure*), sehingga campur tangan pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan (Stiglitz, 2010). Kegagalan pasar dalam konteks beras dapat berwujud informasi asimetris antara produsen dan konsumen, eksternalitas negatif akibat spekulasi harga, serta ketidakmampuan pasar bebas dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin secara adil.

Anderson (2010) mengkategorikan kebijakan HET sebagai kebijakan regulatif yang bertujuan mengarahkan perilaku pasar tanpa meniadakan mekanisme pasar secara keseluruhan. Dalam konteks pangan strategis seperti beras, kebijakan ini

berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial. Namun demikian, keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kecukupan pasokan dan konsistensi penegakan kebijakan di lapangan.

c. Teori Kesejahteraan Konsumen (*Consumer Welfare Theory*)

Pendekatan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) memberikan justifikasi lain bagi penerapan HET. Dalam kerangka ini, kesejahteraan masyarakat diukur dari kemampuan konsumen untuk mengakses barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Beras, sebagai pangan utama yang tidak tergantikan dalam jangka pendek, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. Kebijakan HET yang efektif dapat meningkatkan surplus konsumen, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan proporsi pengeluaran lebih besar untuk pangan (Dornbusch & Fischer, 2014).

2.1.2.2 Sistem Harga Eceran Tertinggi

Sistem HET beras merupakan bagian integral dari kebijakan stabilisasi harga pangan nasional yang dirancang secara terpadu, mencakup proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan aturan secara sinergis. HET ini diberlakukan karena beras merupakan komoditas pangan strategis dengan peran penting dalam ketahanan pangan nasional dan pembentukan inflasi, sehingga kenaikan harga beras yang signifikan dapat menurunkan daya beli masyarakat luas.

Pada tahap perencanaan, penetapan HET dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, seperti harga gabah di tingkat

petani, biaya produksi dan penggilingan, biaya distribusi, margin pedagang, serta kondisi pasokan dan permintaan beras. Saptana dan Supriyati (2012) menegaskan bahwa kebijakan harga pangan akan efektif apabila ditetapkan berdasarkan struktur biaya yang riil dan mencerminkan kondisi pasar aktual.

Kebijakan HET tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, melainkan dibedakan berdasarkan zona geografis. Studi yang dilakukan oleh Rachman (2018) menunjukkan bahwa biaya distribusi beras di wilayah kepulauan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan wilayah non-kepulauan, sehingga sistem zonasi dalam HET menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan harga tanpa mengganggu kelancaran distribusi.

Dalam tahap implementasi, sistem HET diterapkan pada seluruh pelaku usaha perdagangan beras di tingkat eceran, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pemerintah daerah berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan melalui pengawasan harga di pasar. Pengawasan dan penegakan aturan merupakan komponen penting dalam sistem kebijakan HET untuk memastikan bahwa harga jual beras tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Pedagang yang melanggar HET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi HET seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, panjangnya rantai distribusi, serta meningkatnya biaya produksi dan logistik yang tidak sepenuhnya tercermin dalam besaran HET yang ditetapkan (Putri et al., 2023).

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Harga Eceran Tertinggi

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan kebijakan pemerintah yang penetapannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh agar kebijakan HET dapat berfungsi secara efektif dalam mengendalikan harga beras di tingkat konsumen tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha maupun petani.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi HET adalah biaya produksi padi dan harga gabah di tingkat petani. Kenaikan biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja akan mendorong meningkatnya harga gabah, yang pada akhirnya memengaruhi harga beras. Menurut Nuryanti dan Swastika (2016), harga gabah memiliki peran penting dalam pembentukan harga beras karena merupakan komponen biaya terbesar.

Biaya distribusi dan logistik juga merupakan faktor penting. Faktor ini sangat berpengaruh terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Rachman dan Purwantini (2019) menemukan bahwa tingginya biaya distribusi menjadi penyebab utama perbedaan harga beras antarwilayah di Indonesia.

Selain itu, kondisi penawaran dan permintaan beras juga memengaruhi kebijakan HET. Apabila pasokan beras menurun akibat gagal panen atau gangguan distribusi, sementara permintaan tetap tinggi, maka harga beras cenderung mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, penerapan HET yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan kelangkaan beras di pasar. Kebijakan harga akan berjalan

efektif apabila didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai (Saptana dan Supriyati, 2012).

2.1.3 Harga Pembelian Pemerintah

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin harga minimum gabah di tingkat petani. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani padi dari risiko anjloknya harga pada saat panen raya. Dalam teori ekonomi pertanian, HPP dikategorikan sebagai *harga dasar (price support policy)*, yaitu harga yang menetapkan batas bawah harga agar produsen tetap memperoleh pendapatan yang layak.

Secara teoritis, sektor pertanian memiliki karakteristik produksi yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan musim, sehingga harga hasil pertanian cenderung berfluktuasi. Menurut Todaro dan Smith (2015), fluktuasi harga yang tinggi dapat menurunkan insentif petani untuk berproduksi dan berinvestasi. Penetapan HPP gabah pada umumnya didasarkan pada struktur biaya produksi padi, yang meliputi biaya input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta biaya pengelolaan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Handewi dan Rachman (2017) menunjukkan bahwa HPP yang ideal adalah HPP yang mampu menutup biaya produksi dan memberikan margin keuntungan yang wajar bagi petani. Jika HPP ditetapkan di bawah biaya produksi, maka tujuan perlindungan petani tidak akan tercapai.

Selain sebagai instrumen perlindungan petani, HPP juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan beras nasional. Melalui mekanisme pembelian gabah oleh pemerintah, surplus produksi petani dapat diserap dan dikelola sebagai cadangan pangan nasional. Cadangan tersebut kemudian digunakan untuk menstabilkan harga beras ketika terjadi gejolak harga di tingkat konsumen. Studi oleh Yonekura (2016) dalam *Journal of Agrarian Change* menjelaskan bahwa harga pembelian pemerintah pada harga tertentu berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan di negara berkembang.

2.1.3.1 Teori Harga Pembelian Pemerintah

a. Teori Harga Dasar (*Price Floor Theory*)

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara teoretis berlandaskan pada teori harga dasar (*price floor*) dalam ekonomi mikro. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan harga minimum suatu komoditas di atas harga keseimbangan pasar untuk melindungi produsen dari penurunan harga yang merugikan (Mankiw, 2018). Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2018), penerapan harga dasar bertujuan untuk menjamin tingkat pendapatan minimum bagi produsen, khususnya pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga seperti pertanian.

Secara teoritis, penerapan harga dasar akan menciptakan kelebihan pasokan (*excess supply*) apabila harga dasar ditetapkan lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Dalam konteks pertanian, kelebihan pasokan tersebut muncul karena

produsen terdorong untuk meningkatkan produksi, sementara konsumen cenderung mengurangi konsumsi akibat harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks pertanian padi, harga gabah sering mengalami penurunan saat musim panen raya akibat melimpahnya pasokan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip teori harga dasar yang menekankan peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*).

b. Teori Intervensi Pemerintah dalam Pasar Pertanian

Teori intervensi pemerintah menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, terutama pada sektor pertanian (Stiglitz, 2010).

HPP berfungsi sebagai instrumen intervensi yang bertujuan menstabilkan harga di tingkat produsen dan mendorong keberlanjutan produksi pangan. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembeli langsung hasil produksi petani. Intervensi semacam ini umum diterapkan di negara berkembang yang menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan ekonomi.

Prinsip-prinsip teori intervensi pemerintah dalam pasar pertanian menurut (Pindyck & Rubinfeld, 2018):

- 1) Perlindungan produsen (Producer Protection)
- 2) Stabilitas harga dan pendapatan
- 3) Ketahanan pangan (Food Security)

4) Efisiensi sosial dan kesejahteraan

c. Teori Stabilitas Harga

Teori stabilitas harga menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga komoditas untuk melindungi pendapatan produsen (Tomek dan Kaiser, 2014). Fluktuasi harga yang tajam dapat meningkatkan ketidakpastian pendapatan dan menurunkan insentif produksi. Dalam kaitannya dengan HPP, kebijakan ini diharapkan mampu menahan penurunan harga gabah di tingkat petani, sehingga pendapatan petani relatif lebih stabil. Penelitian oleh Rachman (2019) menunjukkan bahwa stabilitas harga gabah melalui HPP berkontribusi positif terhadap daya beli petani dan keberlanjutan usaha tani padi.

d. Teori perlindungan produsen

Teori perlindungan produsen menjelaskan bahwa pemerintah perlu melindungi produsen domestik dari tekanan pasar, baik yang berasal dari kelebihan pasokan domestik maupun dari fluktuasi harga global. Menurut Krugman, Obstfeld, dan Melitz (2018), kebijakan harga minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan produsen yang sah, khususnya untuk sektor strategis seperti pangan.

Dalam konteks HPP, perlindungan diberikan kepada petani padi sebagai produsen utama beras. Dengan adanya HPP, petani memperoleh jaminan harga yang lebih adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini juga berfungsi menjaga ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

2.1.3.2 Sistem Harga Pembelian Pemerintah

Dalam perspektif ekonomi, sistem HPP dikategorikan sebagai harga minimum (*price floor*), yaitu kebijakan yang menetapkan batas harga terendah agar produsen tetap memperoleh pendapatan yang layak (Varian, 2019). Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan kepastian harga di tingkat petani serta menjaga keberlanjutan produksi padi sebagai komoditas pangan utama.

Sistem HPP dilaksanakan melalui penugasan pemerintah kepada lembaga tertentu untuk melakukan pembelian gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan. Harga tersebut menjadi acuan minimum yang harus diterima petani selama memenuhi standar kualitas gabah yang ditentukan. Menurut Handewi dan Rachman (2017), mekanisme ini dirancang untuk mencegah jatuhnya harga gabah di bawah biaya produksi, sehingga petani tetap memiliki insentif untuk melakukan usaha tani padi.

Selain berfungsi sebagai perlindungan harga bagi petani, sistem HPP juga menjadi bagian dari pengelolaan cadangan pangan nasional. Gabah atau beras yang dibeli melalui mekanisme HPP akan disimpan sebagai stok pemerintah dan digunakan untuk berbagai keperluan stabilisasi, seperti operasi pasar atau penyaluran bantuan pangan. Sistem pembelian pemerintah pada harga tertentu merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian (Todaro dan Smith, 2015).

Sistem HPP sangat berkaitan dengan struktur biaya produksi padi. Penetapan harga yang tidak mempertimbangkan kenaikan biaya input pertanian, seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja, dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian Setiawan dan Pratiwi (2022) dalam jurnal *Kenaikan biaya produksi dan implikasinya terhadap kebijakan harga gabah* menunjukkan bahwa ketika HPP tidak disesuaikan dengan kenaikan biaya produksi, pendapatan riil petani cenderung menurun dan berdampak pada melemahnya nilai tukar petani.

Harga pembelian pemerintah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua petani dapat mengakses pembelian gabah oleh pemerintah karena keterbatasan fasilitas, jarak lokasi pembelian, serta persyaratan kualitas gabah yang relatif ketat. Arifin (2018) mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani lebih memilih menjual gabah kepada pedagang perantara dengan harga di bawah HPP.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Pembelian Pemerintah

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi petani dari penurunan harga yang berlebihan, khususnya pada saat panen raya. Di Indonesia, HPP berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga dan pendapatan petani serta sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Penetapan dan implementasi HPP dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan sektoral pertanian (Maulana, 2012).

Menurut Saputra, Arifin, dan Kasymir (2014), HPP tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kondisi produksi, inflasi, serta kebijakan

pemerintah yang lebih luas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Tingkat Produksi Komoditas

Kondisi produksi dan ketersediaan komoditas pertanian merupakan faktor utama dalam penetapan HPP. Pada saat produksi melimpah, terutama pada musim panen raya, harga pasar cenderung turun sehingga pemerintah menetapkan HPP sebagai harga dasar untuk menahan penurunan harga di tingkat petani. Dengan adanya HPP, pemerintah melalui BULOG dapat menyerap kelebihan produksi agar harga tetap berada pada tingkat yang menguntungkan petani (Maulana, 2012).

Penelitian Johan (2020) menunjukkan bahwa tingkat produksi beras memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas HPP dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

2. Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Inflasi, khususnya inflasi pangan, menjadi pertimbangan penting dalam penetapan HPP. HPP yang ditetapkan terlalu tinggi berpotensi mendorong kenaikan harga beras di tingkat konsumen dan memicu inflasi, sementara HPP yang terlalu rendah tidak efektif melindungi petani. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen dalam penetapan HPP (Saputra et al., 2014).

Hasil penelitian Saputra et al. (2014) juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara inflasi dan kebijakan HPP di Indonesia, meskipun efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor implementasi di lapangan.

3. Harga Pasar Internasional dan Kebijakan Impor

Harga komoditas di pasar internasional serta kebijakan impor turut mempengaruhi kebijakan HPP. Ketika harga beras internasional lebih rendah dibandingkan harga domestik, tekanan impor dapat menurunkan harga pasar dalam negeri. Dalam kondisi tersebut, HPP berperan sebagai instrumen proteksi untuk menjaga daya saing dan pendapatan petani domestik (Maulana, 2012).

Menurut Analisis Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, kebijakan HPP diperlukan untuk meredam dampak fluktuasi harga global terhadap pasar domestik, khususnya bagi komoditas strategis seperti beras (Maulana, 2012).

4. Biaya Produksi Petani

Struktur biaya produksi seperti harga pupuk, benih, tenaga kerja, dan biaya pascapanen menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan HPP. Pemerintah cenderung menetapkan HPP di atas biaya produksi rata-rata agar petani memperoleh keuntungan yang layak dan tetap terdorong untuk memproduksi. Apabila HPP tidak mencerminkan kenaikan biaya produksi, maka insentif petani untuk meningkatkan produksi akan menurun (Johan, 2020).

2.1.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator ekonomi makro sektor pertanian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Nilai Tukar Petani didefinisikan sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam periode waktu tertentu. NTP mencerminkan kemampuan

daya beli petani terhadap barang dan jasa, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan proses produksi pertanian.

Nilai tukar petani menjadi ukuran penting karena menggambarkan kondisi ekonomi petani secara langsung. Apabila nilai NTP berada di atas 100, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga petani mengalami surplus atau peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika NTP berada di bawah 100, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran petani lebih besar daripada pendapatan yang diterima, sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan petani cenderung menurun (Saragih, 2018).

Nilai Tukar Petani dibedakan menjadi NTP Nasional dan NTP Subsektor. NTP Nasional merupakan nilai tukar petani secara agregat yang mencerminkan kondisi kesejahteraan petani Indonesia secara keseluruhan. NTP Nasional dihitung sebagai gabungan (agregat tertimbang) dari seluruh subsektor pertanian, sehingga mampu memberikan gambaran umum mengenai kinerja ekonomi sektor pertanian nasional (BPS, 2023).

Nilai Tukar Subsektor merupakan nilai tukar petani yang dihitung secara spesifik berdasarkan masing-masing subsektor pertanian. Menurut BPS (2022), NTP Subsektor terdiri atas lima subsektor utama, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Pembagian ini bertujuan untuk menangkap perbedaan karakteristik usaha tani, struktur biaya, serta pola pendapatan yang berbeda pada setiap subsektor, sehingga analisis kesejahteraan petani dapat dilakukan secara lebih mendalam dan akurat.

Menurut Siregar dan Wahyuni (2020), NTP tanaman pangan memiliki peran strategis karena subsektor ini berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Nilai tukar petani disusun dari dua komponen utama, yaitu Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Indeks Harga yang Diterima Petani menggambarkan perubahan harga komoditas tanaman pangan yang dijual oleh petani, sehingga mencerminkan pendapatan kotor petani. Kenaikan indeks ini menunjukkan adanya peningkatan harga output pertanian yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani (BPS, 2023).

Indeks Harga yang Dibayar Petani mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi. Indeks ini mencakup indeks konsumsi rumah tangga petani serta indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, seperti benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, dan alat mesin pertanian. Peningkatan Ib menunjukkan meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung petani, yang apabila tidak diimbangi dengan kenaikan It, dapat menurunkan kesejahteraan petani (Daryanto, 2017).

Hubungan antara It dan Ib menjadi penentu utama pergerakan NTP tanaman pangan. Apabila peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani, maka NTP tanaman pangan akan meningkat. Sebaliknya, apabila biaya produksi dan kebutuhan konsumsi meningkat lebih cepat dibandingkan harga jual hasil tanaman pangan, maka NTP akan menurun. Stabilitas harga output pertanian dan pengendalian biaya

produksi merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan petani tanaman pangan (Suryana, 2019).

2.1.4.1 Teori Nilai Tukar Petani

a. Definisi dan Formulasi NTP

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani didefinisikan sebagai perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b). NTP digunakan sebagai indikator untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan kesejahteraan petani dari waktu ke waktu (BPS, 2023). Apabila NTP lebih besar dari 100, maka secara umum petani mengalami surplus atau peningkatan kesejahteraan, sebaliknya apabila NTP lebih kecil dari 100 menunjukkan bahwa petani berada pada kondisi defisit.

Secara matematis, Nilai Tukar Petani dirumuskan sebagai berikut:

$$NTP = \left(\frac{I_t}{I_b} \right) \times 100$$

Keterangan:

I_t = Indeks Harga yang Diterima Petani

I_b = Indeks Harga yang Dibayar Petani

Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) merupakan indeks yang mencerminkan perubahan harga hasil-hasil pertanian yang dijual oleh petani. Indeks ini menggambarkan tingkat pendapatan nominal petani dari aktivitas produksi pertanian. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b)

mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang harus dibayar petani, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan proses produksi pertanian, seperti pupuk, benih, pestisida, dan biaya tenaga kerja (Sukirno, 2011).

Apabila $NTP > 100$, secara umum petani mengalami surplus atau peningkatan kesejahteraan. Apabila $NTP < 100$, petani berada pada kondisi defisit, artinya pengeluaran petani lebih besar dari pendapatan yang diterima (Sukirno, 2011).

b. Teori *Terms of Trade* Pertanian (*Agricultural Terms of Trade*)

NTP merupakan adaptasi dari konsep *terms of trade* dalam perdagangan internasional yang diterapkan pada level petani. Konsep ini, yang secara umum dikenal sebagai *internal terms of trade* antara sektor pertanian dan non-pertanian, menggambarkan posisi relatif petani dalam struktur ekonomi. Ketika *terms of trade* membaik (NTP meningkat), petani dapat memperoleh lebih banyak barang non-pertanian dengan jumlah output pertanian yang sama, yang berarti kesejahteraan petani meningkat. Sebaliknya, ketika *terms of trade* memburuk (NTP menurun), posisi petani dalam perekonomian melemah (Daryanto, 2017).

2.1.5 Produksi Padi

Produksi merupakan suatu proses transformasi berbagai sumber daya (*input*) seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi yang diolah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan manusia (Syukur & Fitri, 2022). Dalam model produksi usahatani padi sawah, produksi padi didefinisikan sebagai hasil produksi padi yang diperoleh dari

lahan tertentu, biasanya dalam satuan kilogram (kg) atau ton, dari lahan tertentu (Walis et al., 2021). Produksi beras merujuk pada sebuah proses pertanian yang melibatkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan beras sebagai komoditas pangan utama bagi sebagian besar populasi dunia (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.1.5.1 Teori Produksi dalam Ekonomi

Menurut teori produksi klasik, *output* pertanian merupakan fungsi dari *input* lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi (Nicholson & Snyder, 2012). Dalam konteks padi, lahan sawah merupakan faktor produksi utama, sementara produktivitas mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan *input* lainnya, seperti benih, pupuk, pestisida, serta teknologi budidaya.

Selain itu, konsep produksi padi berkaitan erat dengan teori pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, karena mampu meningkatkan pendapatan petani, menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

2.1.5.2 Rumus Perhitungan Produksi Padi

Perhitungan produksi padi dalam statistik pertanian pada umumnya didasarkan pada hubungan antara luas panen dan tingkat produktivitas tanaman padi. BPS dan FAO menggunakan pendekatan kuantitatif yang serupa, sehingga memungkinkan hasilnya untuk dibandingkan baik antarwilayah maupun antarperiode waktu. Secara umum, produksi padi dirumuskan sebagai berikut (BPS, 2019):

$$Y = A \times PP$$

Keterangan:

Y = Produksi Padi (ton)

A = Luas Panen Padi (hektar)

PP = Produktivitas Padi (ton/hektar)

Rumus tersebut menunjukkan bahwa produksi padi merupakan fungsi langsung dari luas panen dan produktivitas. Peningkatan salah satu komponen, dengan asumsi komponen lainnya tetap (*ceteris paribus*), akan meningkatkan jumlah produksi padi.

2.1.6 Kajian Empiris

Kajian empiris adalah sebuah proses yang diperlukan dalam membangun kerangka pemikiran, hal ini bertujuan agar kerangka pemikiran memiliki dasar yang kuat. Mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian merupakan salah satu proses dalam membangun kerangka berpikir. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Implikasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras Terhadap Profitabilitas Usaha Tani Padi, Harga, Kualitas, Serta Serapan	Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Beras.	<i>Profitabilitas</i> usaha tani padi, kualitas dan serapan beras di beberapa Provinsi.	<i>Profitabilitas</i> usaha tani padi meningkat setelah HET ditetapkan - Harga beras medium	Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 17 No. 1, Juni 2019, hlm. 59-77.

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Beras di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan (Benny Rachman, Adang Agustian, Arif Syaifudin, 2025).			cenderung naik mendekati batas HET - Harga premium cenderung menurun namun tetap stabil tinggi.	
2	Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga dan Ketersediaan Beras di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan (Desi, et al., 2019).	Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Beras.	Ketersediaan beras di Tingkat pedagang Provinsi Sumatera Selatan	Tidak semua pedagang setuju dengan kebijakan HET - Terjadi perubahan jenis beras yang dijual - Efektivitas HET beras medium tidak efektif (1,028) - Efektivitas HET beras premium cukup efektif (0,920) - Terdapat migrasi medium ke premium.	JSEP Vol. 12 No. 3, November 2019, hlm. 49-57.
3	<i>Strategy of Implementation Highest Medium Rice Retail Price Policy</i> (Riyan Nur Rifai, 2020, Kota Semarang, Jawa Tengah)	Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Beras.	Fokus pada implementasi kebijakan (SWOT analisis).	Ancaman utama, rantai distribusi beras yang Panjang menjadikan harga beras di Semarang cenderung naik melebihi HET.	<i>Journal of Development Economics</i> , 3(1), 698-709.

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kebijakan HET Harga Eceran Tertinggi dan Pengaruhnya Terhadap Harga Beras di Sulawesi Selatan (Jumriani Dambe dan Hamsiah, 2023).	Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Beras.	Tempat dan waktu penelitian serta variable <i>independent</i> yang lainnya.	Kebijakan HET berpengaruh terhadap volatilitas harga beras sebelum HET.	Jurnal <i>E-Business</i> ITBM Polewali Mandar Vol.3 No.1, 2023.
5	Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga dan Ketersediaan Beras di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatra Selatan. (Aryani, et al., 2019).	Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Beras	Tempat dan waktu penelitian serta variable <i>dependent</i> yang lainnya	Penetapan HET menyebabkan perubahan harga beras, di mana harga beras medium cenderung meningkat mendekati HET, sedangkan harga beras premium cenderung menurun dan berada di bawah HET. Selain itu, efektivitas HET pada beras medium belum efektif, sementara pada beras premium tergolong efektif.	<i>Journal of Global Economy, Business and Finance</i> (JGEBF), 4(6), 47-51.

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	<i>Implikasi Kebijakan HET Beras Terhadap Harga, Profitabilitas Usahatani Padi, Kualitas, serta Serapan Beras di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan</i> (Rachman et al., Nasional, 2019)	Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Beras	Variabel profitabilitas usahatani padi, kualitas, dan serapan beras, cakupan tiga provinsi besar.	Penetapan HET menyebabkan harga beras medium meningkat mendekati batas HET, sedangkan harga premium cenderung menurun atau stabil.	<i>The impact of government purchase price policy of rice for producers and consumers in Indonesia. Jurnal Lahan Suboptimal: Journal of Suboptimal Lands</i> , 13(1), 52-60.
7	Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia (Edy Siswanto, et al., 2018)	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Harga Beras.	Fokus pada kesejahteraan (<i>surplus produsen-consumen</i>), bukan pada determinan harga eceran.	Menunjukkan Perubahan kebijakan beras dapat mempengaruhi kondisi pasar beras Indonesia secara signifikan. Peningkatan HPP, kredit pertanian, dan subsidi pupuk dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dan konsumen.	Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 23(2), 93-100.
8	Pengaruh Produksi Padi, Impor Beras dan Konsumsi Beras Terhadap Harga Beras di Indonesia	Produksi padi dan harga beras.	Tempat dan waktu penelitian serta variabel <i>independe</i>	Menunjukkan bahwa produksi padi dan impor beras tidak berpengaruh	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi: Vol 13, No 1 (2025)

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 2004-2023. (Fadilah & Swastika., 2025).		nt yang lainnya.	signifikan terhadap harga beras, sedangkan konsumsi beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras.	
9	Pengaruh Produksi Padi, Impor Beras, dan Konsumsi Beras Terhadap Harga Beras di Indonesia Tahun 2000-2018. (bakti., 2021).	Produksi padi dan harga beras.	Tempat dan waktu penelitian serta variable <i>independe nt</i> yang lainnya	Menunjukk a bahwa produksi padi berpengaruh signifikan terhadap harga beras.	Jurnal Kebijakan Ekonomi, 11(2), 126-142
10	<i>Pengaruh Produksi Padi, Harga Gabah Kering Panen, dan Konsumsi Beras Terhadap Harga Beras di Indonesia (34 Provinsi, 2013-2019)</i> (Anggita, Nasional, 2021)	Produksi padi dan Harga Beras	Variabel harga gabah kering panen dan konsumsi beras, data panel 34 provinsi, tidak menganalisis HET, HPP, dan NTP.	Produksi padi berpengaruh positif terhadap harga beras di Indonesia. Harga gabah kering panen berpengaruh signifikan terhadap harga beras.	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi: 9(4), 331-347.
11	<i>The Effect of Farmers' Exchange Rates on Rice Prices in 2017-2019</i> (Pujiono, et al., 2023, Indonesia (Nasional)	Variabel Nilai Tukar Petani (NTP) dan harga beras.	Data tahunan 2017-2019. Analisis per kualitas beras (<i>premium, medium, rendah</i>).	NTP berpengaruh 69.16% terhadap harga beras <i>premium</i> di giling. Harga beras <i>medium</i> pada Mei	<i>The Effect of Farmers' Exchange Rates on Rice Prices in 2017-2019, Luxury: Landscape of Business</i>

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tidak secara spesifik menganalisis HET dan HPP sebagai variabel <i>independent</i> .	2019 Rp 9,729.59/kg. Harga beras rendah Rp 9,536.60/kg. NTP merupakan faktor signifikan dalam menentukan harga beras tingkat giling.	<i>Administrati on Vol. 1 No. 2, 2023.</i>
12	<i>Market-Approach-Based Policy to Achieve Rice Price Stability in Indonesia—Can It Be a Complement?</i> (Topan Ruspayandi, et al., nasional 2022)	Harga eceran beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET).	Variabel BULOG's <i>Market Share</i> , Harga internasional, Produksi, Konsumsi, CMO.	HET <i>policy</i> berpengaruh pada dinamika harga, efektivitas tergantung koordinasi kebijakan lain.	<i>Market-Approach-Based Policy to Achieve Rice Price Stability in Indonesia. Economies, 10(296).</i>
13	<i>POLICY OPTIONS TO LOWER RICE PRICES IN INDONESIA</i> (Hizkia Respatiadi, Hana Nabila, 2018)	Harga beras eceran domestic, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).	Dengan rentang data Mei 2009 - Mei 2017 (97 observasi).	<i>Cointegration</i> antara harga domestik dan internasional, tapi harga Indonesia terdeviasi dan lebih mahal dan HET menekan pedagang eceran, tapi tengkulak/penggilingan/pedagang grosir ambil laba terbesar.	<i>Policy Options to Lower Rice Prices in Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 12(1), 95-116.</i>

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Harga pembelian pemerintah (hpp) gabah-beras efektivitas dan implikasinya terhadap kualitas dan pengadaan oleh bulog di kabupaten karawang (mohamad maulana, dan benny rachman, 2011)	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Harga Beras.	Menggunakan data primer lokal Karawang dan Periode awal kebijakan HPP (2007-2010, pre-COVID).	HPP GKP efektif dalam menjaga stabilitasi harga di tingkat petani.	Analisis Kebijakan Pertanian, 9(4), 331-347.
15	<i>The impact of government purchase price policy of rice for producers and consumers in Indonesia</i> (Wahyudi, et al., 2024)	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Harga Beras.	Tempat dan waktu penelitian serta variable <i>independent</i> yang lainnya.	Kenaikan HPP sebesar 18-20% dapat meningkatkan harga gabah dan beras dari Maret sampai Agustus 2023.	<i>Journal of Suboptimal Lands</i> , 13(1), 52-60.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini memuat penjeleasan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Maka dari itu, penulis telah membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan Harga Eceran Tertinggi dengan Harga Beras

Secara teoretis, Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan implementasi dari *price ceiling* atau harga maksimum dalam teori ekonomi mikro. Mankiw (2018) menjelaskan bahwa *price ceiling* yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar berfungsi membatasi harga jual di tingkat eceran, sehingga secara langsung memengaruhi besaran harga yang diterima konsumen. Dalam

kerangka teori ini, setiap perubahan besaran HET baik kenaikan maupun penurunan akan ditransmisikan ke dalam struktur harga pasar, karena HET berfungsi sebagai *price anchor* atau jangkar harga normatif yang menjadi acuan pelaku usaha dalam menentukan harga jualnya (Kemendag, 2017).

Pindyck dan Rubinfeld (2018) menjelaskan bahwa dalam kondisi di mana *price ceiling* tidak mengikat secara efektif (*non-binding*), yaitu ketika harga pasar berada di atas batas maksimum yang ditetapkan, mekanisme pasar tetap beroperasi, namun kebijakan tersebut tetap memengaruhi ekspektasi dan perilaku pelaku pasar. Dalam konteks perberasan Indonesia, HET yang terus mengalami penyesuaian ke atas mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika harga aktual di lapangan. Kenaikan HET memberi sinyal kepada pedagang bahwa harga di atas level HET lama secara resmi diakui pemerintah, sehingga secara tidak langsung mendorong penyesuaian harga jual ke level yang lebih tinggi.

Dari perspektif teori kebijakan publik, Anderson (2010) menegaskan bahwa *price ceiling* yang berulang kali disesuaikan ke atas justru dapat kehilangan daya pengendaliannya, karena pelaku pasar mengantisipasi penyesuaian lebih lanjut. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara HET dan harga beras cenderung bersifat *positif*. Setiap kenaikan HET akan diikuti oleh kenaikan harga eceran beras, karena pedagang memiliki ruang penetapan harga yang lebih luas.

Penelitian Rachman et al. (2025) yang dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menemukan bahwa setelah penetapan HET, harga beras medium cenderung bergerak mendekati batas HET, mengindikasikan bahwa HET

berfungsi sebagai referensi harga yang memengaruhi pembentukan harga pasar. Studi Desi et al. (2019) di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kenaikan HET diikuti oleh kenaikan harga beras di tingkat pedagang, dengan efektivitas HET medium yang tidak optimal (indeks 1,028). Rifai (2020) dalam analisisnya di Kota Semarang menemukan bahwa rantai distribusi yang panjang menjadi faktor utama yang membuat harga beras secara konsisten berada di atas HET, namun pergerakan harga tetap mengikuti arah perubahan HET. Dambe dan Hamsiah (2023) mengkonfirmasi bahwa HET berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga beras, di mana perubahan HET memengaruhi dinamika harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan uraian teoritis dan dukungan studi empiris tersebut, dalam penelitian ini diduga bahwa HET berpengaruh positif terhadap harga beras di Provinsi Maluku. Setiap kenaikan HET akan memberikan sinyal bagi pelaku pasar untuk menyesuaikan harga jual ke level yang lebih tinggi, sehingga harga eceran beras di pasar akan ikut meningkat sejalan dengan perubahan HET.

2.2.2 Hubungan Harga Pembelian Pemerintah dengan Harga Beras

Secara konseptual, HPP lebih berorientasi pada sisi hulu (produsen/petani), sedangkan harga beras terbentuk pada sisi hilir yang dipengaruhi oleh struktur pasar, biaya distribusi, margin perdagangan, serta dinamika permintaan dan penawaran beras di tingkat konsumen (Arifin, 2018).

Secara teoretis, hubungan antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan harga beras di tingkat konsumen dapat dijelaskan melalui teori transmisi harga (*price transmission theory*). Meyer dan von Cramon-Taubadel (2004) menjelaskan

bahwa perubahan harga di satu tingkatan pasar akan ditransmisikan ke tingkatan pasar lainnya melalui rantai pasok komoditas. Kenaikan HPP akan meningkatkan harga gabah referensi di tingkat petani, yang selanjutnya diteruskan oleh pedagang dan penggilingan dalam bentuk penyesuaian harga beli dan harga jual beras.

Dalam kerangka teori *price floor* (Mankiw, 2018), HPP yang ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar akan mendorong peningkatan produksi padi karena petani memiliki insentif harga yang lebih baik. Namun, kenaikan HPP juga meningkatkan biaya pengadaan beras bagi penggilingan dan distributor, yang kemudian ditransmisikan ke harga jual beras melalui mekanisme *cost-push*. Varian (2019) menjelaskan bahwa dalam kondisi di mana rantai pasok beras cukup panjang dan terdiri atas beberapa tingkatan, transmisi biaya dari HPP ke harga eceran dapat terjadi secara bertahap dan tidak simetris, namun tetap memiliki arah yang positif dalam jangka menengah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Studi oleh Rachman dan Purwantini (2020) menunjukkan bahwa HPP gabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga gabah di tingkat petani, namun pengaruhnya terhadap harga beras di tingkat konsumen relatif lemah. Penelitian Saptana et al. (2021) juga menemukan bahwa transmisi harga dari gabah ke beras tidak bersifat sempurna akibat panjangnya rantai pasok dan dominasi pedagang perantara. Selain itu, Hidayat dan Widodo (2022) menyimpulkan bahwa faktor utama pembentuk harga beras adalah biaya distribusi, margin perdagangan, dan kebijakan impor, sementara HPP hanya berperan tidak langsung dan sering kali tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan uraian teoretis dan dukungan studi empiris tersebut, dalam penelitian ini diduga bahwa HPP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras di Provinsi Maluku. Kenaikan HPP yang disertai dengan kebijakan penyerapan dan distribusi cadangan beras pemerintah justru berpotensi menekan harga beras eceran melalui penambahan pasokan di pasar. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena faktor-faktor lain seperti biaya logistik, kondisi distribusi antarpulau, dan kebijakan HET lebih dominan dalam menentukan harga beras eceran di Provinsi Maluku..

2.2.3 Hubungan Nilai Tukar Petani dengan Harga Beras

Hubungan antara Nilai Tukar Petani (NTP) dan harga beras dapat dipahami melalui dua mekanisme teoretis yang saling melengkapi. Melalui mekanisme *cost-push*, ketika NTP menurun akibat meningkatnya biaya produksi (kenaikan komponen *Ib* seperti biaya pupuk, benih, dan tenaga kerja yang melampaui kenaikan harga gabah yang diterima petani/*It*), kondisi ini mencerminkan tekanan biaya di tingkat produksi. Biaya produksi yang tinggi akan mendorong petani untuk menaikkan harga jual gabah agar tetap memperoleh keuntungan yang memadai, yang selanjutnya ditransmisikan ke harga beras di tingkat penggilingan dan eceran (Suryana, 2019).

Dari perspektif teori daya beli (*purchasing power theory*), Rosyidi (2009) menjelaskan bahwa NTP yang rendah mencerminkan kondisi di mana biaya yang dibayar petani (*Ib*) meningkat lebih cepat daripada harga yang diterima (*It*). Dalam konteks transmisi harga, kenaikan *Ib* yang mencerminkan kenaikan biaya input produksi akan ditransmisikan ke dalam harga gabah dan beras melalui mekanisme

cost pass-through. Dengan demikian, ketika I_b meningkat dan menekan NTP ke bawah, harga beras di tingkat konsumen justru cenderung ikut meningkat karena biaya produksi yang lebih tinggi harus diserap oleh seluruh rantai pasok.

Kenaikan harga beras juga berimplikasi langsung terhadap penerimaan usaha tani padi. Selama kenaikan harga tersebut tidak diikuti oleh peningkatan biaya produksi yang lebih besar, seperti harga pupuk, benih, dan tenaga kerja, maka margin keuntungan petani akan meningkat. Kondisi ini memperkuat NTP dan mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani tanaman pangan (Kustiari & Susilowati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Maulana (2016) menunjukkan bahwa fluktuasi harga gabah dan beras memiliki pengaruh signifikan terhadap NTP subsektor tanaman pangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian teoritis dan dukungan empiris dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hubungan positif antara NTP dan harga beras selaras dengan teori ekonomi pertanian dan kondisi struktural subsektor tanaman pangan di Indonesia.

2.2.4 Hubungan Jumlah Produksi Padi dengan Harga Beras

Secara umum, teori permintaan dan penawaran (*supply and demand theory*) menyatakan bahwa peningkatan jumlah pasokan suatu komoditas akan menekan harga ke bawah. Namun, hubungan antara produksi padi dan harga beras dalam konteks wilayah non-produsen seperti Provinsi Maluku tidak selalu mengikuti pola teoretis yang sederhana tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Provinsi

Maluku bukan merupakan sentra produksi padi nasional, sehingga volume produksi padi lokal yang relatif kecil tidak cukup signifikan untuk secara langsung memengaruhi keseimbangan pasokan dan harga beras di wilayah tersebut (Harianto, 2018). Sebagian besar kebutuhan beras Maluku dipenuhi dari luar daerah, sehingga fluktuasi produksi lokal tidak serta-merta tercermin dalam pergerakan harga beras di pasar.

Dalam teori harga komoditas pertanian *Cobweb Theory* menjelaskan bahwa respons produksi terhadap perubahan harga tidak bersifat instan, melainkan terdapat *time lag* yang menyebabkan fluktuasi harga yang berulang. Ketika produksi padi pada periode tertentu rendah, harga beras akan naik pada periode tersebut tingginya harga akan mendorong petani meningkatkan luas tanam pada musim berikutnya, sehingga produksi meningkat dan harga kembali turun. Siklus inilah yang menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga beras yang bersifat periodik dan dapat diprediksi mengikuti siklus musim tanam (Tomek & Kaiser, 2014).

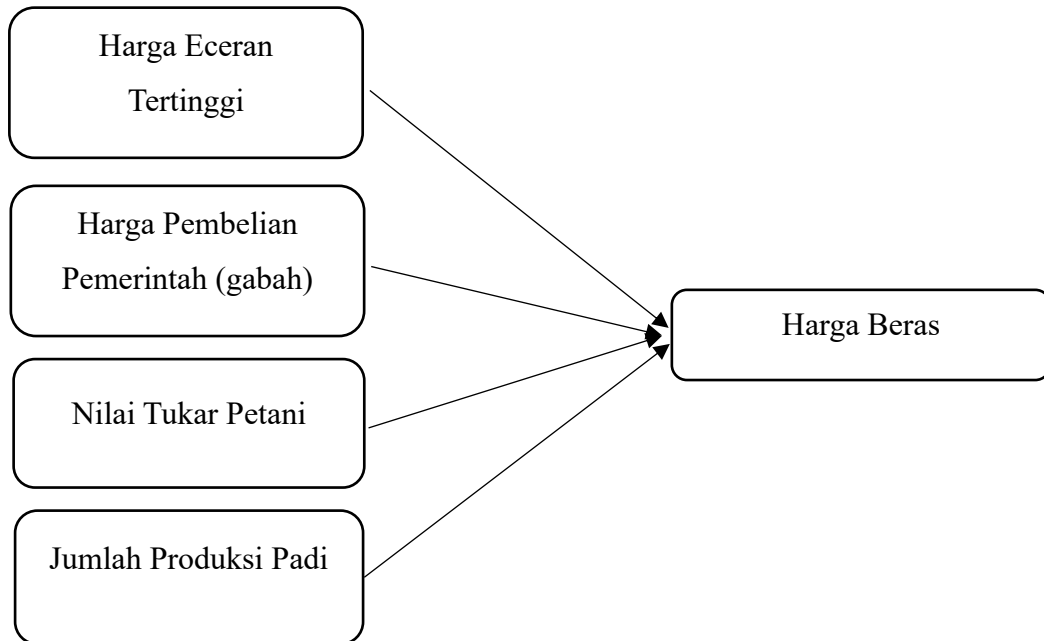
Ketika produksi padi lokal meningkat, sebagian petani justru memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk menaikkan harga jual gabah karena permintaan dari penggilingan dan pedagang lokal turut meningkat. Kenaikan harga gabah ini kemudian ditransmisikan ke harga beras di tingkat konsumen melalui mekanisme *cost-push*. Kondisi ini sejalan dengan temuan Saptana & Suryana (2020), bahwa di wilayah dengan infrastruktur distribusi yang terbatas, peningkatan produksi lokal tidak serta-merta menurunkan harga beras karena biaya pascapanen, penggilingan, dan distribusi internal tetap tinggi.

Penelitian Harianto (2018) dalam kajiannya menemukan bahwa di daerah non-produsen, produksi padi lokal memiliki pengaruh yang lemah dan tidak konsisten terhadap harga beras karena dominannya pasokan dari luar daerah. Saptana dan Suryana (2020) menambahkan bahwa hubungan antara produksi padi dan harga beras sangat dipengaruhi oleh struktur rantai distribusi dan kondisi infrastruktur wilayah di daerah kepulauan, kenaikan produksi lokal tidak selalu diikuti penurunan harga beras karena biaya distribusi dan penggilingan tetap tinggi. Bella et al. (2024) mengkonfirmasi bahwa faktor kebijakan pemerintah seperti HPP dan HET, serta gangguan distribusi antardaerah, lebih dominan dalam memengaruhi harga beras di wilayah non-produsen dibandingkan volume produksi lokal.

Berdasarkan uraian teoretis dan dukungan studi empiris tersebut, dalam penelitian ini diduga bahwa jumlah produksi padi berpengaruh positif terhadap harga beras di Provinsi Maluku. Kondisi ini mencerminkan realitas struktural Provinsi Maluku sebagai wilayah non-produsen, di mana harga beras lebih banyak ditentukan oleh pasokan dari luar daerah, kebijakan harga pemerintah, dan biaya logistik antarpulau dibandingkan oleh volume produksi padi lokal. Peningkatan produksi padi lokal tidak secara otomatis menekan harga beras ke bawah mengingat kontribusinya yang masih sangat terbatas terhadap total pasokan beras di Provinsi Maluku.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat tentatif terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Jawaban ini didasarkan pada kerangka teori yang relevan, namun belum didukung oleh bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan (Sugiyono, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial harga eceran tertinggi, nilai tukar petani dan jumlah produksi padi berpengaruh positif sementara harga pembelian pemerintah (gabah) berpengaruh negatif terhadap harga beras di Provinsi Maluku periode Januari 2023-Agustus 2025.

2. Diduga secara bersama-sama harga eceran tertinggi, harga pembelian pemerintah (gabah), nilai tukar petani dan jumlah produksi padi berpengaruh terhadap harga beras di Provinsi Maluku periode Januari 2023-Agustus 2025.